



PISAgroNEWS

Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture

ISSUE NO 23
**DEC
2021**



Special Edition: **Showcasing Indonesia's Best Potential in the Upcoming G20**

Contact Us: [✉ contact@pisagro.org](mailto:contact@pisagro.org) [🌐 www.pisagro.org](http://www.pisagro.org) [📷 pisagro_secretariat](https://www.instagram.com/pisagro_secretariat/) [🐦](https://twitter.com/PISAgro) [ƒ](https://facebook.com/PISAgro) [in](https://linkedin.com/company/pisagro) PISAgro



Daftar Isi

03 Kata Pengantar *Opening Remarks*

04 Cerita Utama *Cover Story*

- 04 Pertanian di Ajang G20
- 06 Agriculture at the G20

08 Fitur *Features*

- 08 Pertanian Indonesia Sebagai Pusat Perhatian
- 10 Indonesian Agriculture as Center of Attention In G20

12 Profil *Profile*

- 12 Mahendra Siregar: Presidensi G20 Sebagai Kesempatan Kita Showcase Di Ranah Global
- 15 Mahendra Siregar: Indonesia to Showcase Agriculture Achievements in G20 Presidency

18 Webinar

- 18 Peningkatan Produktivitas Petani Jagung (Pakan) Melalui Sistem Penyediaan Benih Yang Kontinyu Dan Berkelanjutan
- 20 Increasing Corn Farmers' Productivity of Through A Continuous and Sustainable Seed Supply System
- 22 Menggali Potensi Sumber Bahan Lokal untuk Pakan Ternak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)
- 24 Using Indonesian National Standards (SNI) To Explore Local Ingredients' Potential for Animal Feed

26 WG Story

- 26 Jelang COP 26, Save The Children Rilis Dampak Krisis Iklim Di Indonesia
- 27 Save The Children Releases Reports on Climate Crisis Impact in Indonesia Ahead of COP 26

28 PISAgro Update

- 28 Acara Peluncuran Toolkit Pelaporan Keberlanjutan GRI dan PISAgro
- 29 GRI and PISAgro Sustainability Reporting Toolkit Launching Event

Tim Editorial

KONTEN

Ferial Lubis
Radyani Prasasya
Dyaning Pangestika

DESAIN & LAYOUT

Robiah Nur Fauziah

KONTRIBUTOR FOTO

Tim PISAgro

Kata Pengantar



Insan Syafaat

Direktur Eksekutif
Sekretariat PISAgro

Rekan-rekan yang terhormat,

Selamat datang di edisi perdana PISAgro News untuk tahun 2022. Terlepas dari berbagai kendala yang melanda di tahun sebelumnya, kita masih diberi kesempatan untuk menggunakan tahun ini sebaik-baiknya untuk memulai lembaran baru.

Di penghujung tahun 2021, negara kita mendapatkan kehormatan untuk memegang tampuk presidensi G20 yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Penyerahan presidensi ini sendiri telah dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, pada Oktober lalu.

Oleh karena itu, dalam edisi kali ini kami membahas mengenai bagaimana pencapaian ini dapat menjadi ajang bagi Indonesia untuk memamerkan kemajuan kita dalam sektor pertanian, serta upaya-upaya apa saja

yang bisa dilakukan oleh industri pertanian untuk meningkatkan reputasi Indonesia di ranah global.

Kami juga telah berbicara dengan Wakil Kementerian Luar Negeri Mahendra Siregar untuk mempelajari lebih lanjut mengenai upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk pegiat usaha di industri pertanian untuk mendukung pemerintah dalam memamerkan Indonesia di ajang presidensi G20 yang akan dilaksanakan tahun ini.

Akhir kata, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas dukungan yang telah diberikan sehingga Sekretariat PISAgro dapat terus melakukan kegiatan kami. Selamat tahun baru, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua.

Opening Remarks

Esteemed readers,

We are so happy to see you again in the premiere edition of PISAgro News in 2022. Regardless of the varying obstacles that hit us in the previous year, we are still given the opportunity to make the best use of this year to start a new chapter in our life.

At the end of 2021, our country received the honor to host the upcoming G20 presidency which will be held this year. The handover was carried out during the closing session of the G20 Rome Summit which took place in La Nuvola, Rome, Italy, in October last year.

Therefore, in this edition we would like to invite you to discuss how this achievement can be an opportunity for Indonesia to showcase our progress in the agricultural sector, as well as what kind of efforts agricultural industry players can contribute to improve Indonesia's reputation within the global sphere.

We also received an opportunity to talk to the Vice Ministry of Foreign Affairs Mahendra Siregar to learn more about what efforts can be made for business players within the agricultural industry to support the government in showcasing Indonesia's achievements at the G20 presidency.

Cerita Utama

Pertanian di Ajang G20

Sektor pertanian sebagai bagian penting dari perekonomian, tidak hanya untuk mencapai ketahanan pangan dan kecukupan nutrisi, tetapi juga upaya meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi perubahan iklim.

Radyani Prasasya

Negara-negara dalam Forum G20 menyadari pentingnya peran penting sektor pangan dan pertanian pada kondisi perekonomian dunia. Melalui Kelompok Kerja Pertanian (*Agricultural Working Group/AWG*) atau *Agriculture Ministerial Meeting (AMM)*, diskusi terkait dengan sektor pertanian aktif dilangsungkan setiap tahun. Agenda AWG tak lepas dari upaya mencapai *Zero Hunger Goal* 2030 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan demikian, komitmen G20 mencakup Agenda 2030 dan menepati upaya Perjanjian Iklim Paris (*Paris Climate Agreement*), dengan cara melakukan transformasi sistem pangan dan pertanian, melibatkan tindakan pencegahan perubahan iklim melalui model yang berkelanjutan.

Pertanian G20 Belajar dari COVID-19

Pandemi global telah sering disebutkan memberi pelajaran untuk memperkuat sistem ekonomi dan rantai pasok. Tetapi di sisi lain juga menyadarkan kita pentingnya memperhatikan hubungan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan di sekitar kita. Perwakilan-perwakilan negara menyadari resiko penyebaran penyakit dari hewan (*zoonosis*) dan acaman-ancaman biologis lainnya seperti resistensi antimikroba dan ditemukannya berbagai jenis penyakit menular yang baru. Keamanan pangan dan tanggung jawab penggunaan bahan-bahan maupun teknologi pertanian menjadi pelajaran penting.

Dalam dokumen communique AMM G20 tahun 2021, forum Menteri Pertanian dan Irigasi

menyepakati pentingnya tanggung jawab kesehatan lingkungan melalui pendekatan One Health. Kesepakatan tersebut menjadi pengingat bagi industri dan pelaku usaha pertanian untuk bertanggung jawab dengan tindakan yang merusak ekosistem, memicu resistensi hama penyakit, dan justru menurunkan keberlanjutan sistem budidaya pertanian. Kurangnya perhatian pada sistem Good Agricultural Practice dikhawatirkan menyebabkan kurangnya keamanan pangan dan kegagalan pertanian yang keduanya menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan upaya pengentasan kelaparan.

Sejak AMM G20 tahun 2020, respon terhadap ancaman krisis pangan akibat pandemi sudah menjadi perhatian. Pertemuan tersebut menegaskan larangan pembatasan perdagangan produk pertanian non-tarif di luar kebutuhan rasional negara. Pernyataan sejenis kembali lagi dibawakan di AMM 2021 terkait upaya perdagangan agrifood internasional yang transparan, terbuka, dan non-diskriminatif untuk mempercepat recovery dari pandemi. Setelah pandemi dan penurunan kasus, krisis-krisis ekonomi baru dapat terjadi akibat lonjakan permintaan, inflasi, dan kemacetan logistik. AMM 2022 diprediksi akan menjadi lebih kontekstual dengan efek perekonomian pasca pandemi.

Pertanian Berkontribusi untuk Iklim dan Beradaptasi terhadap Iklim

Tak jarang menjadi salah satu kambing hitam penyebab gas rumah kaca, deforestasi, dan krisis sumber daya genetik, pertanian harus



membuktikan sebaliknya. Ada tanggung jawab besar pertanian untuk meningkatkan resistensi terhadap hama dalam rangka mendorong produksi pangan tanpa mengganggu keragaman sumber daya genetik. Communique tersebut juga mendorong diversifikasi pangan, tidak hanya untuk mengatasi kelaparan tetapi juga upaya polikultur menghadapi hama secara alami. Perubahan iklim yang sudah terjadi adalah tantangan bagi produksi pangan. Banjir, badai, angin kencang, hingga kekeringan kemudian menjadi rintangan yang mau tidak mau harus dihadapi. Upaya adaptasi pertanian dengan iklim ini memerlukan kerja sama dari peneliti untuk pengembangan teknologi, dukungan industri, serta komitmen pemerintah untuk menjalankan program dan meningkatkan kesiagaan bencana.

Dengan menyadari interaksi pertanian dengan iklim, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam, setiap tindakan harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari transformasi sistem pangan, memastikan transisi ke model berkelanjutan, tanpa merugikan siapa pun.

Pertanian G20 Memperhatikan Kesejahteraan Sosial

Fokus penting lain yang menjadi perhatian pada AMM G20 tahun 2021 adalah memastikan keberlanjutan pertumbuhan sistem pangan (food system) dengan mendorong ekonomi pelakunya, terutama meningkatkan kesejahteraan petani, serta aktif melibatkan wanita dan pemuda. Untuk mencapai hal tersebut, maka akses edukasi, modal, teknologi, dan pasar harus difasilitasi.

Cover Story

Agriculture at the G20

The agricultural sector is an important part of the economy, not only to achieve food security and adequate nutrition, but also to improve welfare and tackle climate change issues.

Radyani Prasasya

The G20 countries are aware of how important the food and agriculture sectors are within the world's economic conditions. Every year, these countries host a series of discussions related to the active agricultural sector such as the Agricultural Working Group (AWG) or the Agriculture Ministerial Meeting (AMM). The AWG agenda cannot be separated from the efforts to achieve the 2030 Zero Hunger Goal of the Sustainable Development Goals. Thus, the G20 commitment always includes the 2030 Agenda and strategies to fulfill the Paris Climate Agreement through a systematic transformation of food and agriculture systems, as well as climate change prevention actions through sustainable models.

G20 Agriculture To Learn from COVID-19

The global pandemic has often been cited as a learning opportunity to strengthen economic systems and supply chains. However, on the other hand, it also makes us aware of the importance of the interaction between humans, and the animals and plants around us. Country representatives are aware of the risk of zoonotic transmission as well as other biological threats such as antimicrobial resistance and the discovery of new types of infectious diseases. Food safety, responsible agricultural materials and technology use serve as important lessons for us all.

In the 2021 AMM G20 communique, the Agriculture and Irrigation Minister forum reached an agreement on the importance of

a responsible environmental health practice through the "One Health" approach. This agreement serves as a reminder for industry and agricultural business actors to be responsible for any damaging actions toward the ecosystems that could increase pest resistance and lower the sustainability of agricultural cultivation systems. The lack of attention to the Good Agricultural Practice system is feared to cause the lack of food security and trigger agricultural failure, both of which pose a threat to food security and the global collective efforts to eradicate hunger.

Following the 2020's AMM G20, there has been a growing concern pertaining to food crisis response due to the pandemic. The meeting emphasized the prohibition of trade restrictions in non-tariff agricultural products outside the rational state. A similar statement was made again at AMM 2021 regarding transparent, open, and non-discriminatory international agrifood trade efforts to accelerate recovery from the pandemic. Once the pandemic ends and cases start to decline, new economic crises could occur due to a spiking demand, inflation, and logistical bottlenecks. AMM 2022 is predicted to be more contextual with the post-pandemic economic effects.

Agriculture Contributes to Climate and Adapting to Climate

Given that the agricultural sector often became the scapegoat for environmental issues such as greenhouse gasses, deforestation, and genetic resources crisis, it is deemed fit that the



agriculture industry must fight back to prove otherwise. There is a great responsibility for the agricultural resistance to start looking into ways to increase plants' resistance to pests in order to promote food production without compromising the diversity of genetic resources. The communique also encourages food diversification, not only to overcome hunger but also as a polyculture effort to deal with pests using natural methods. The changing climate is a challenge for food production. Floods, storms, strong winds, and droughts will become new obstacles that we would have to inevitably fight against. Every effort to integrate agriculture to adapt into the current climate condition requires cooperation from researchers to develop the needed technology, industrial support, as well as the government's commitment to implement programs and improve disaster preparedness.

the farmers' welfare, as well as encouraging active involvement from the women and the youngsters. To achieve this, the government needs to facilitate access to education, capital, technology, and markets. By recognizing the impact of the interaction between the agriculture sector and the climate, biodiversity and natural resources, every effort should take the economic and social impacts from food systems transformation into account as to ensure a smooth transition to a sustainable model.

G20 Agriculture Pays Attention to Social Welfare

Another important focus of concern in the AMM G20 in 2021 is to ensure a sustainable growth in the food system by boosting the economy performance, especially to improve

Fitur

Pertanian Indonesia Sebagai Pusat Perhatian

Menjadi Role Model dengan Keunikannya Sendiri

Radyani Prasasya



Momen presidensi Indonesia di forum ekonomi G20 digadang-gadang memberikan potensi keuntungan ekonomi bagi Indonesia. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, diharapkan terjadi peningkatan konsumsi hingga 1,7 triliun rupiah dan peningkatan PDB 7,47 triliun. Dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Indonesia, diharapkan menjadi ajang unjuk diri kemampuan dan kesiapan Indonesia pada investasi dan kerja sama internasional.

Dengan mengusung tema '**Recover Together, Recover Strong**', Indonesia berencana untuk membawa isu ketimpangan pemulihan global akibat pandemic. Ketimpangan tersebut paling dirasakan negara emerging and berkembang, serta kelompok penduduk miskin, lansia, disabilitas, kemudian wanita dan anak-anak. Sehingga agenda keuangan akan fokus pada kesehatan, transisi energi, dan transformasi digital untuk mendorong pemulihan dan perkembangan ekonomi.

Tidak hanya terpilih menjadi Presiden G20 untuk periode 2021-2022, Indonesia resmi

terpilih menjadi ketua Kelompok Kerja Pertanian (*Agriculture Working Group*) melalui Pertemuan Menteri Pertanian dan Irigasi (*Agriculture Ministerial Meeting*). Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjadi perwakilan ketua kelompok kerja berkomitmen untuk fokus pada penghapusan kelaparan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mendorong perdagangan pangan dan akses pangan melalui G20. Dengan salah satu prioritas komunikasi AMM tahun 2021 untuk mengatasi dampak pandemi, Indonesia memiliki kesempatan optimis menunjukkan keberhasilannya mempertahankan peningkatan kontribusi sektor pertanian pada ekonomi nasional meski terjadi pandemi.

Dengan tanggung jawab besar tak hanya sebagai presiden G20 tetapi juga perwakilan emerging and developing countries. Inklusivitas yang diinginkan dalam upaya pemulihan pasca pandemi harus merangkul negara-negara yang paling terdampak.

Menteri Pertanian secara khusus dalam AMM G20 Italia menyuarakan dorongan untuk sistem pangan yang berkelanjutan dan ketahanan pangan termasuk untuk Kawasan Afrika. Dengan isu perubahan iklim, bencana alam, dan pangan diperburuk munculnya pandemi yang semakin membatasi dan memberatkan kondisi. Indonesia dalam presidensinya akan juga memberikan perhatian khusus untuk mendorong G20 memberikan perhatian khusus bagi Afrika untuk mencapai target penghapusan kelaparan.

Perhatian Dunia pada Indonesia

Perhatian terhadap Indonesia yang menjadi kesempatan promosi, di saat yang sama juga menjadi tantangan. Dunia akan melihat sendiri kapasitas, prestasi, dan bahkan kekurangan yang mungkin kita miliki. Bagian sebagian, ini adalah momen memastikan kelayakan Indonesia sebagai mitra kerja sama dan investasi. Bagi sebagian lainnya, ini adalah tuntutan pembuktian kemampuan leadership Indonesia sebagai role model bagi negara berkembang terutama Afrika.

Selain tugas pemerintah untuk memfasilitasi showcase pembuktian tersebut, pemegang kepentingan lain di sektor pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar menjalankan kegiatan pertanian dengan baik. Dengan membantu mendorong kelancaran distribusi di rantai pasok, optimasi kegiatan budidaya, serta pengembangan teknologi, diharapkan Indonesia layak menunjukkan diri sebagai role model ketahanan pangan. Sebagai Presiden G20 dan Presiden AWG G20, tantangan pembuktian tidak hanya sebatas penyelenggaraan konferensi dan side events lainnya, tetapi juga bukti kompetensi industri yang berjalan secara tidak langsung ikut diperhatikan masyarakat dunia.

Sebagai contoh pada pertemuan AWG G20 Niigata, Jepang pada tahun 2019, momen tersebut adalah showcase teknologi otomasi pertanian Jepang serta produk pangan

berkualitas tinggi yang telah lama dikenal sebagai spesialisasi negara tersebut. Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan Jepang dan memiliki potensi untuk memanfaatkannya. Tetapi, tantangan Indonesia adalah menonjolkan spesialisasi pertanian kita tanpa berusaha meniru cara negara lain untuk mendemonstrasikan prestasinya. Pemerintah dan industri bisa menjual keunikan sektor pertanian kita mulai dari keragamannya, cara budidayanya yang berbeda, kearifan lokal dalam budidaya, teknik pengolahan produk, serta cita rasa khasnya.

Presidensi AWG G20 adalah kesempatan sekaligus tantangan untuk menjadi role model dan mempromosikan keunikan pertanian dan produknya. Momen bagi calon mitra untuk melihat kelayakan kemitraan maupun investasi di sektor pertanian, begitu juga momen pembuktian Indonesia sebagai contoh dan pemimpin bagi negara emerging and developing lainnya.

Feature

Indonesian Agriculture as Center of Attention In G20

Becoming a Role Model with Its Own Uniqueness

Radyani Prasasya

The moment of Indonesia's presidency at the G20 economic forum is predicted to provide potential economic benefits for Indonesia. According to Coordinating Minister for the Economy Airlangga Hartarto, this achievement is expected to increase consumption by Rp 1.7 trillion (USD 117.8 million) and gross domestic product by Rp 7.47 trillion. Since Indonesia will host various activities related to G20, the government also hoped that they would be able to showcase Indonesia's capabilities and readiness for investment and international cooperation.

Indonesia also plans to spread awareness regarding inequality within global pandemic recovery efforts under the theme of 'Recover Together, Recover Strongly'. The effect of this disparity is strongly felt by emerging and developing countries, as well as people from vulnerable groups. Therefore, the financial agenda will be focusing on health, energy transition, and digital transformation to promote economic recovery and development.

Not only was Indonesia elected as President of the G20 for the period 2021-2022, Indonesia was also appointed to be the chairman of the Agriculture Working Group (AWG) through the Agriculture Ministerial Meeting. Agriculture Minister Syahrul Yasin Limpo will represent Indonesia as the chairman representative of the working group committed to eliminate hunger as stipulated in the Sustainable Development Goals (SDGs) by encouraging food trade and food access through the G20.

Since one of the 2021 AMM communique priorities is mitigation efforts during the COVID-19 pandemic, Indonesia is optimistic

to use this opportunity to showcase its success in maintaining the increasing agricultural sector's contribution to maintain the national economy despite the impact of the pandemic. The desired inclusiveness in post-pandemic recovery efforts must embrace the most affected countries.

The Agriculture Minister, specifically in the AMM G20 Italy, encouraged the participants to commit to achieving a sustainable food system and food security, including the African region. Indonesia will also use this opportunity to encourage other G20 countries to pay special attention to Africa to eliminate hunger.

World's Attention to Indonesia

As the world will turn their heads toward Indonesia, this could either be seen as an opportunity to promote the country or a challenge. The world will see for itself the capacities, achievements, and even shortcomings that we may have. For other people, this could also serve as a moment to ensure Indonesia's eligibility as a cooperation and investment partner. For some others, this is a demand to prove Indonesia's leadership ability as a role model for developing countries, especially Africa.

In addition to the government's duty to showcase those achievements, other stakeholders in the government sector also have a big responsibility to conduct agricultural activities properly. By encouraging a smooth distribution within the supply chain, optimizing cultivation activities, and developing technology,

Indonesia hopefully will be worthy of showing itself as a role model for food security.

As the President of the G20 and the President of the AWG G20, the challenge of proof is not only limited to holding conferences and other side events, but also evidence of industrial competence that is indirectly being taken into account by the world community.

For example, at the AWG G20 Niigata, which took place in Japan in 2019, the moment was used to showcase Japan's agricultural automation technology and high-quality food products that have long been recognized as the country's specialty. Indonesia has the same opportunity as Japan and has the potential to take advantage of it. However, Indonesia's challenge is to highlight our agricultural specialization without trying to imitate others. The government and industry can sell the uniqueness of our agricultural sector starting from its diversity, different cultivation methods, local wisdom in cultivation, product processing techniques, and its distinctive taste.

The AWG G20 presidency is an opportunity as well as a challenge for Indonesia to be a role model and promote the uniqueness of agriculture and its products. This is also the moment for our potential partners to see Indonesia's feasibility of partnerships and investments in the agricultural sector, as well as the moment to prove Indonesia's preparedness to become a leader for other emerging and developing countries.



Profil

Mahendra Siregar:

*Presidensi G20 Sebagai Kesempatan
Kita Showcase Di Ranah Global*



Di penghujung tahun 2021, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah Presidensi G20. Pencapaian yang besar ini tentunya harus diikuti dengan adanya peningkatan kinerja sektor industri lokal, salah satunya adalah bidang agrikultur. Pada kesempatan kali ini PISAgro mendapatkan kehormatan untuk berbincang-bincang dengan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Mahendra Siregar, untuk mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas guna meningkatkan citra Indonesia ranah global. Simak wawancara kami dalam artikel berikut ini.

Bagaimana persepsi bapak mengenai potensi sektor agrikultur untuk meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lainnya?

Sektor agrikultur atau pertanian sendiri itu luas. Memang kalau dibagi dua ada yang diperuntukkan pasar dalam negeri seperti pangan cash crops, tapi ada juga yang

diproduksi dan diolah serta dieksport ataupun digunakan untuk industri peningkatan nilai tambahan yang menjadi bagian dari global value chain.

Nah, kalau saya melihatnya dari kelompok yang kedua ini. Pada kelompok ini memang telah terjadi satu perubahan mendasar dimana beberapa waktu lalu banyak negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memproduksi komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Komoditas produk bahan-bahan baku ini kemudian dieksport dan diolah di tempat lain untuk meningkatkan nilai tambah mereka, lalu diimpor kembali ke negara masing-masing untuk dikonsumsi oleh konsumen mereka sebagai produk jadi. Indonesia adalah salah satu dari negara-negara ini.

Selama 20 tahun belakangan ini, Indonesia telah mengembangkan strategi yang mengutamakan peningkatan nilai tambah dari bahan-bahan baku tersebut. Strategi ini dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan para pelaku usaha yang terlibat, pendapatan negara, serta diharapkan juga dapat memperbaiki harga jual komoditas. Masalahnya, banyak yang berpandangan bahwa strategi ini dapat meningkatkan resiko-resiko tertentu, seperti misalnya apakah industri dalam negeri dapat menampungnya, lalu apakah ekspor komoditas bahan baku yang sebelumnya dapat menjadi bahan olahan di luar negeri sana menjadi berkurang serta mengancam peluang kerja sektor industri di negara mereka.

Jika kita kaitkan dengan konteks pertanyaan ini, tentu bagaimana kita dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan negara lain supaya mereka bisa menjadi bagian dari proses produksi peningkatan nilai tambah yang telah saya sebutkan. Kalau kita berbicara dari segi peningkatan produktivitas produk pertanian, hal ini bisa dilakukan melalui

investasi, teknologi, dan penerapan best practices. Disitu kita juga dapat memperkenalkan brand internasional sebagai bagian dari jaringan distribusi logistik, dan sebagainya. Peran bilateral kita yang tadinya hanya condong ke arah ekspor barang mentah menjadi beragam, seperti investasi, teknologi, IPR atau brand, dan distribusi. Hal ini menjadikan peranan dari sektor agrikultur dan turunannya menjadi lebih strategis dari sebelumnya.

Menanggapi kabar baik mengenai terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 di tahun 2022, apa yang dapat sektor pertanian Indonesia lakukan untuk mendukung pemerintah dalam aspek ini?

Saya rasa secara keseluruhan kita harus menampilkan bukan hanya sektor pertanian saja, tapi juga perekonomian, politik, kondisi sosial dan penanganan pandemi kita. Ini adalah kesempatan kita untuk showcase pada dunia bahwa Indonesia itu sudah up to date, sebab kemungkinan besar persepsi umum ranah global terhadap Indonesia itu masih belum berkembang.

Contohnya saja, kalau membicarakan sektor pertanian Indonesia negara-negara lain masih berpikir kita semata-mata berlutut di eksport bahan mentah dan komoditas-komoditas seperti tembakau dan rempah-rempah, tidak ada perubahan sejak 100 tahun lalu, serta sistem produksi yang masih dilakukan secara tradisional. Padahal kita sudah mengimplementasikan standar produksi yang telah disesuaikan dengan best international practices. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan bahwa negara kita sudah menerapkan standar internasional ini.

Apa inisiatif yang harus dilakukan smallholders di Indonesia untuk mengakses pasar global mengingat sektor swasta dan pemerintah sudah memiliki inisiatif mereka masing-masing?

Kalau saya melihatnya tidak ada kontradiksi sama sekali, karena para petani kecil harus dapat memenuhi standar kriteria kualifikasi dalam produksi mereka agar dapat mengakses pasar internasional atau pasar modern dalam negeri di luar pasar subsistence. Kriteria ini memang harus dipenuhi sebab hal tersebut adalah penentu apakah mereka bisa memperoleh akses ke pasar internasional atau tidak.

Namun sebaliknya, jika kita melihat perusahaan-perusahaan investor yang mengolah serta meningkatkan nilai tambah dari para petani kecil plasma maupun independen, mereka juga harus mampu memenuhi standar yang terkait. Jika mereka tidak dapat memenuhi standar, tentu hasil produksi pun tidak akan memadai, jadi kebutuhan dua sisi itu tadi saling menunjang, saling terkait.

Di luar itu, tentu pemerintah dan stakeholders lain mempunyai kepentingan untuk memiliki satu ekosistem dan juga iklim yang kondusif mulai dari segi infrastruktur, sistem perpajakan, dan sistem untuk peningkatan pemberdayaan pertanian. Kita harus memikirkan bagaimana sistem irigasinya, akses terhadap produk-produk inputs, belum lagi riset-riset seperti penelitian bibit dan metode tanam untuk meningkatkan produksi. *There is no contradiction there.*

Seringkali pertanyaannya setelah semua ini dipenuhi adalah siapa yang harus membayar? Karena pemenuhan semua hal-hal tadi belum tentu murah, apalagi gratis. Apakah konsumen mau bayar premium fee? Extra charge? Seringkali jawabannya tidak. Saya lihat hal ini masih agak timpang. Di satu sisi masih banyak bicara soal climate change, standar berkelanjutan, dan pemenuhan kewajiban internasional, tapi kemudian di lain pihak tidak ada yang bayar.

Jadi ya memang tidak mudah karena semua langkahnya tidak murah dan mekanismenya belum terbangun baik, masih ada yang bolong disitu. Tapi sudahlah, itu realita yang harus kita

upayakan, meski bukan berarti juga kita harus mengorbankan standar karenanya. Harus diingat bahwa kedepannya harus ada yang menanggung agar makin baik dan makin berkelanjutan.

Dukungan apa yang kiranya perlu dilakukan oleh PISAgro untuk memperkuat smallholders pertanian Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global?

PISAgro harus dapat memanfaatkan momentum G-20 dan menyampaikan pesan yang berimbang terhadap apa yang terjadi di negara kita. Sebab kalau tidak, kesannya negara tujuan ekspor atau konsumen hanya bisa menuntut kewajibannya untuk dipenuhi oleh negara yang produksi. Padahal seharusnya itu menjadi peran dan kewajiban bersama.

Disini, PISAgro diharapkan bisa menyampaikan pesan yg berimbang bahwa ini adalah kewajiban riil semua pihak untuk dipikul bersama dalam menerapkan langkah-langkah berkelanjutan itu. Sebab kalau tidak, ini akan menjadi resiko menuju *zero sum game*. Dan resiko terbesarnya adalah ketidakberlanjutan itu sendiri. Semua teknologi dan inovasi sebenarnya sudah ada dan sudah dikuasai oleh manusia, tapi penerapannya itu harus memiliki satu wisdom. Perlu juga adanya sikap saling memahami dalam pembagian kewajiban agar berimbang, bukan kemudian menerapkan *punishment* tidak melihat kondisi riilnya. Malah yang dihasilkan menjadi kontra produktif terhadap tujuan itu sendiri.

Profile

Mahendra Siregar:

Indonesia to Showcase Agriculture Achievements in G20 Presidency

Near the end of 2021, Indonesia received the honor to host the upcoming G20 Presidency. However, one question still lingers: what should the agriculture sector do to make use of this opportunity to showcase their achievements? Vice Minister of the Foreign Affairs Ministry, Mahendra Siregar, has shared some of his insights to us to improve Indonesia's global image through our agricultural productivity.

Check out our interview in the following article.

What are your views regarding the agricultural sector's potential to improve Indonesia's bilateral relations?

Our agricultural sector has a wide range of products. If we divide them into two categories, some are destined for the domestic market, such as cash crops, but some are meant to be processed as exported goods or used to add more value as a part of the global value chain.

I would like to answer this question by looking into the second group, in which we can see that there has been a fundamental change happening in many developing countries, including Indonesia, in which we tend to produce various commodities that are identified as a part of the global supply chain. These commodities are then exported and processed elsewhere to increase their added value, then imported back to their respective countries for consumption. Indonesia is one of these countries.

Over the past 20 years, Indonesia has developed a strategy which focuses on

increasing the added value of these raw materials. This strategy is expected to be able to increase job opportunities, income for the business actors involved, state income, as well as the commodities' selling prices itself. The problem is, many are of the view that this strategy can increase certain risks, such as whether the domestic industry can accommodate them, and a declining demand for raw materials export that could lead to unemployment threats.

If we connect this to the context of this question, surely we need to figure out how we can take advantage of this potential to improve Indonesia's relations with other countries so that they can be part of the production process that I have mentioned before. If we were talking about increasing agricultural products' productivity, this target can be achieved through investment, technology, and implementing best practices to our production process. From there, we can also introduce international brands as a part of our logistics distribution network, and so on. Our bilateral roles, which were previously only limited to exporting raw goods, have become diverse and starting to include other responsibilities as well such as investment, technology, intellectual property rights, branding, and distribution. This has caused the role of the agricultural sector and its derivatives to become more strategic than before.

What are your views regarding the agricultural sector's potential to improve Indonesia's bilateral relations?

I think rather than limiting it to our agriculture sector, we should showcase our nation's improvement as a whole, such as our achievements in economy, politics, social conditions and even upon handling the [COVID-19] pandemic. This is our opportunity to showcase to the world that Indonesia is already up to date,

because the global sphere will most likely still think of us as an underdeveloped nation.

For example, when we talk about our agricultural sector, other countries still think that we are still focusing on exporting raw materials and other commodities such as tobacco and spices, that there has been no change since the colonization era, and that our production is still carried out traditionally even though we have subjected our industry to follow international practices standards since a long time ago. We must use this opportunity to convey the message that our country has implemented this international standard.

What kind of initiatives should Indonesia's smallholders take in order to access the global market considering that the private sector and the government already have their own strategies?

The way I see it is that there is no contradiction [between the global standards and local farmers' standards] at all, since small farmers are required to meet certain qualifications upon conducting their production process in order to access international markets or modern domestic markets [outside the subsistence market]. Furthermore, these requirements are also compulsory because it plays a crucial role to determine whether they can gain access to the international market or not.

Then if we were looking at investor companies that cultivate and increase added value from small plasma and independent smallholders, we can see that they are also required to meet certain standards for their production, in which failure of doing so will result in insufficient product quality. Therefore, it is safe to say that these sides are mutually supportive, that they are closely intertwined with each other.

The government and other stakeholders, undoubtedly, are keen on having a conducive business climate, which includes important elements such as a developed infrastructure, taxation system, as well as a comprehensive

method to increase agricultural empowerment. We also have to think about the irrigation system, access to input products, and studies such as seed research and planting methods to increase production. There is no contradiction there.

One of the most frequent questions pertaining to this issue is who will pay for all of these? Are the consumers willing to pay a premium fee? The answer is often: no. On the other hand, there are still a lot of issues that need to be discussed such as climate change, sustainable practice standards, and fulfilling international obligations, but the problem is no one is willing to fund this.

This is not an easy task because these efforts are expensive, not to mention the lack of a well-developed mechanism. But never mind that, it's a reality that we must fight against, although that doesn't mean we have to sacrifice our standards for it. Bear in mind that in the future we need someone to bear [the costs] so that we can create a better and more sustainable environment.

What kind of support does PISAgro have to contribute in order to strengthen Indonesia's agricultural smallholders against the global economic dynamics?

PISAgro must be able to take advantage of the G20 momentum and deliver a balanced message about what is happening in our country, since there has been a circulating impression that the export destination country or the consumer can only demand that the producing country fulfills its obligations, even though it should be shared between both parties.

Hence, PISAgro is expected to be able to convey a balanced message that this responsibility has to be shared fairly in order to implement these sustainable measures properly. If not, it could lead to a zero sum game risk. And the biggest risk is the unsustainability itself. All technologies

and innovations have existed and have been controlled by humans since a long time ago, but we need wisdom to apply it. It is also necessary to have mutual understanding in the distribution of obligations to be balanced, not to punish regardless of the real condition. In fact, what is produced could be counter-productive to the goal itself.

Webinar

Peningkatan Produktivitas Petani Jagung (Pakan) Melalui Sistem Penyediaan Benih Yang Kontinyu Dan Berkelanjutan

Ferial Lubis



Salah satu permasalahan dalam penyediaan pakan unggas yang berdaya saing di Indonesia adalah masih tingginya kandungan bahan pakan impor dalam produksi pakan. Sekitar 35% dari volume bahan pakan unggas di Indonesia masih bergantung pada komponen impor seperti bungkil kelapa, corn gluten meal, meat bone meal dan premiks. Pemanfaatan bahan pakan lokal seringkali terkendala karena faktor kontinuitas dan volume pasokan serta harganya yang relatif lebih mahal dibandingkan bahan pakan impor.

“Dari 87 pabrik pakan yang ada, sebanyak 63 pabrik pakan (72,41%) berada di Pulau Jawa. Sekitar 2,18 juta ton produksi jagung yang dihasilkan dari wilayah yang tidak terdapat pabrik pakan, atau setara 9,53% dari total produksi jagung nasional tahun 2020.” ujar Koordinator Bahan Pakan Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian, Diner Yusrizal dalam webinar “Peningkatan Produktivitas Petani Jagung (Pakan) Melalui Sistem Penyediaan Benih Yang Kontinyu Dan Berkelanjutan” yang diadakan oleh PISAgro pada 16 Desember 2021.

Oleh sebab itu, Diner menambahkan, diperlukan sistem logistik yang baik untuk perdagangan antar pulau dan antar provinsi sehingga harga jagung dapat stabil dan terjangkau.

Dalam webinar ini juga dibahas mengenai

ketersediaan benih jagung yang berkualitas dari berbagai aspek (kebijakan, penelitian, rantai pasok, permintaan dan penawaran) dengan harapan adanya masukan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya sehingga ketersediaan dan penggunaan benih jagung yang berkualitas dapat diperluas.

Kondisi yang diharapkan dalam rangka meningkatkan produktivitas petani adalah adanya unsur ketersediaan benih jagung yang berkualitas dan dapat diakses oleh petani sehingga dapat menanam benih jagung berkualitas dengan menerapkan good agricultural practices (GAP).

Menurut Direktur Perbenihan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. M. Takdir Mulyadi, Kementerian Pertanian telah menetapkan target produksi jagung tahun 2021 sebesar 23 juta ton (KA 25%)/20,01 juta ton (KA 14%), sedangkan target produksi jagung tahun 2024 sebesar 35,30 juta ton (KA 25%)/30,71 juta ton (KA 14%).

“Strategi yang ditetapkan untuk pencapaian target tersebut yang terkait dengan penyediaan benih jagung antara lain perluasan areal tanam baru, penggunaan benih bermutu dan bersertifikat, serta pergantian varietas dengan varietas unggul baru provitas tinggi,” ungkap Takdir dalam webinar tersebut. Meskipun demikian, beberapa daerah di

Indonesia masih mengalami kendala seputar rendahnya produktivitas jagung. Misalnya saja Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun jagung memiliki nilai yang signifikan di daerah tersebut sebagai sumber utama bahan baku dan makanan pokok, produktivitas jagung NTT masih lebih rendah dibanding provinsi lainnya.

Untuk mengatasi masalah ketersediaan benih jagung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah berupaya untuk mengembangkan program dan kebijakan terkait produksi benih dan pengembangan jagung, serta melakukan pendampingan teknis kepada petani.

Di samping itu, untuk mempermudah akses petani terhadap ketersediaan benih jagung yang berkualitas dan berkesinambungan, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak seperti petani, produsen benih, offtaker dan pemerintah. Masing-masing pihak juga perlu menjalankan perannya masing-masing untuk mendukung kerjasama ini.

Materi selengkapnya terkait webinar ini dapat anda akses melalui bit.ly/pakanjagung.

Webinar

Increasing Corn Farmers' Productivity of Through A Continuous and Sustainable Seed Supply System

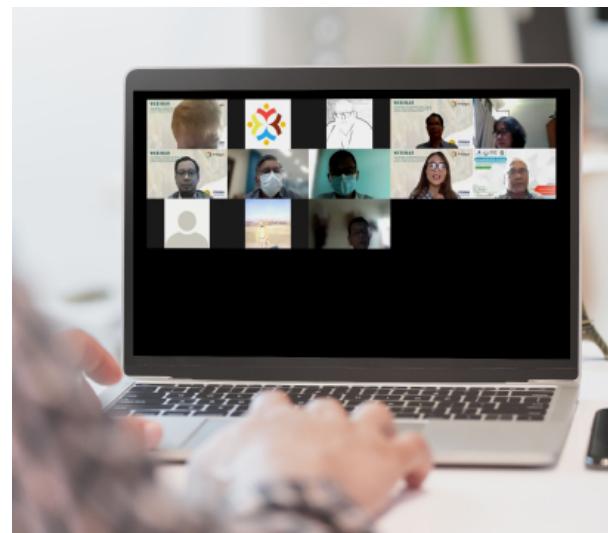
Ferial Lubis

One of the problems in providing competitive poultry feed in Indonesia is the high content of imported feed ingredients in feed production. Around 35% of the poultry feed ingredients in Indonesia still relies on imported components such as coconut pulps, corn gluten meal, meat bone meal and premix. The usage of local feed ingredients is often constrained due to the continuity factor and supply volume, as well as a relatively expensive price compared to imported feed ingredients.

"Of the 87 existing feed factories, as many as 63 feed factories (72.41%) are located in Java. Around 2.18 million tons of corn production are produced from areas where there are no feed factories, or equivalent to 9.53% of the total national corn production in 2020." said the Coordinator of Feed Materials of the Directorate General of Livestock, Ministry of Agriculture, Diner Yusrizal in the webinar "Improving the Productivity of Corn (Feed) Farmers Through a Continuous and Sustainable Seed Supply System" held by PISAgro on December 16, 2021.

Therefore, Diner added, a good logistics system is needed for inter-island and inter-provincial trade so that corn prices can be stable and affordable.

This webinar also discusses the availability of quality corn seeds from various aspects (policy, research, supply chain, demand and



supply) with the hope that there will be input for the government and other related parties so that the availability and use of quality corn seeds can be expanded.

In order to increase farmer productivity, the farmers are expecting an accessible supply of high quality corn seeds so that they could cultivate them by implementing good agricultural practices (GAP).

According to the Director of Seeds from the Directorate General of Food Crops, Ministry of Agriculture, Dr. M. Takdir Mulyadi, the Ministry of Agriculture has set a corn production target in 2021 of 23 million tons (KA 25%)/20.01 million tons (KA 14%), while the corn production target in 2024 is 35.30 million tons (KA 25 %)/30.71 million tons (KA 14%).

"The strategies include expanding new planting areas, using high quality and certified seeds, and replacing old varieties with new high-yielding varieties," said Takdir during the webinar.

However, several regions in Indonesia are still experiencing problems related to low maize productivity. For example, East Nusa Tenggara (NTT). Although maize has a significant value in the area as a major source of raw materials and staple foods, maize productivity in NTT is still lower than in other provinces. To overcome the problem of the availability of corn seeds, the

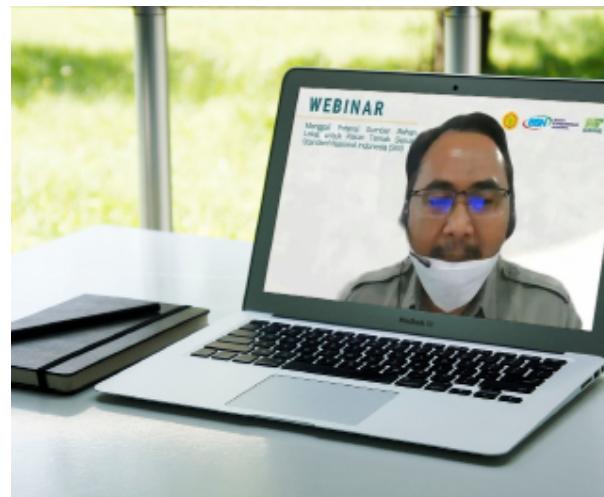
Department of Agriculture and Food Security has made efforts to develop programs and policies related to seed production and corn development, as well as providing technical assistance to farmers.

In addition to the aforementioned solutions, a cooperation between various parties such as farmers, seed producers, off-takers and the government is needed to facilitate farmers' access to the availability of quality and sustainable corn seeds. Each party also needs to carry out their respective roles to support this collaboration.

You can access the complete material related to this webinar via [**bit.ly/pakanjagung**](https://bit.ly/pakanjagung).

Webinar

Menggali Potensi Sumber Bahan Lokal untuk Pakan Ternak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)



Ferial Lubis

Indonesia masih memiliki peluang besar dalam mengembangkan ternak ruminansia karena adanya potensi sumber daya pakan lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan sistem pakan berbasis sumberdaya lokal menjadi pilar yang mendukung perkembangan produksi peternakan di Indonesia yang berkelanjutan, efisien dan kompetitif. Hasil sisa, hasil samping dan limbah berbagai jenis tanaman merupakan sumber bahan baku pakan alternatif yang potensial.

“Beberapa masalah pakan ternak di Indonesia di antaranya adalah adanya keterbatasan lahan untuk pakan berkualitas, fluktuasi produksi dan kualitas, serta rendahnya kualitas pakan sumber hijauan karena kandungan serat kasar yang tinggi,” ungkap Guru Besar Universitas Brawijaya, Prof. Hendrawan Soetanto dalam webinar “Menggali Potensi Sumber Bahan Lokal untuk Pakan Ternak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)” yang diadakan oleh PISAgo pada tanggal 14 Oktober 2021.

Selain itu, kemampuan produksi ternak yang relatif rendah berhubungan dengan kualitas dan kuantitas pakan yang tersedia sepanjang tahun. Ketersediaan pakan yang berfluktuasi dan tidak mencukupi kebutuhan gizi ternak untuk mengekspresikan potensi genetiknya secara maksimal, menyebabkan produktivitas ternak relatif rendah.

Terlepas dari kendala-kendala tersebut, Indonesia masih memiliki peluang besar

dalam mengembangkan ternak ruminansia karena adanya potensi sumber daya pakan lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan sistem pakan berbasis sumberdaya lokal menjadi pilar yang mendukung perkembangan produksi peternakan di Indonesia yang berkelanjutan, efisien dan kompetitif. Hasil sisa, hasil samping dan limbah berbagai jenis tanaman merupakan sumber bahan baku pakan alternatif yang potensial.

Oleh karena itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) dibutuhkan sebagai acuan dalam membuat sertifikat pendaftaran pakan serta referensi dalam pengawasan mutu pakan dan bahan pakan yang beredar.

“Bahan pakan lokal berpotensi sebagai bahan pakan ternak untuk mendukung pengembangan ternak ruminansia, pengolahan dapat meningkatkan kualitas nutrisinya dan dapat mempermudah dalam pencampuran ransum. Dengan teknik formulasi berbagai bahan yang tersedia dan disuplementasi akan didapatkan ransum sesuai dengan SNI/PTM.” jelas Ahli Peneliti Utama Balai Penelitian Ternak (BPT) Badan Litbang Pertanian, Dr. Dwi Sulistiyanı.

Selain itu, untuk mengatasi kendala ini, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan pakan nasional terdiri dari feed security yaitu menjamin ketersediaan pakan unggas dan pakan ruminansia menuju kemandirian pakan. Program kerjanya di antaranya adalah optimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal serta pengembangan pabrik atau unit pengolahan pakan.

Data dari Kementerian Pertanian mengatakan hingga tahun 2021 sudah terdapat 10 bank pakan yang tersebar di Lampung, Indramayu, Probolinggo, Majalengka, Situbondo, Mojokerto dan Bima. Di samping itu, para peneliti juga telah melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kandungan nutrisi beberapa sumber bahan lokal untuk pakan ternak melalui proses pengujian untuk mendapatkan SNI.

Materi selengkapnya mengenai webinar ini dapat anda unduh melalui: bit.ly/pakansni.

Webinar

Using Indonesian National Standards (SNI) To Explore Local Ingredients' Potential for Animal Feed

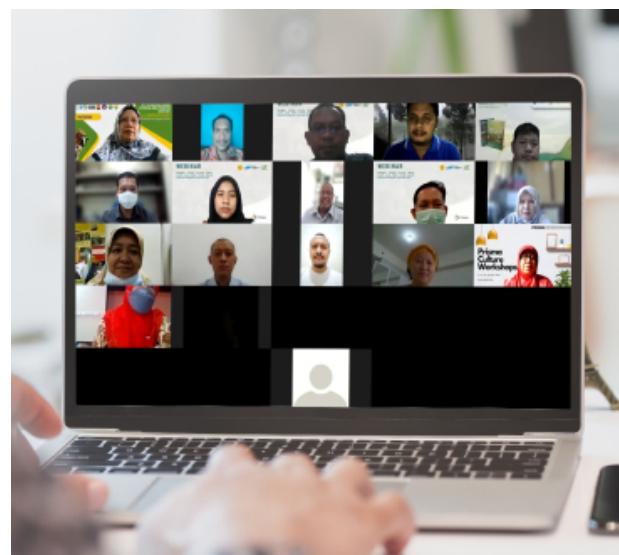
Ferial Lubis

Indonesia still has great opportunities in developing ruminants due to local feed resources potentials that have not been used optimally. The development of a local resource-based feed system is a pillar that supports the sustainable, efficient and competitive development of the entire livestock production in Indonesia. The by-products and waste generated from various types of plants serve as alternative ingredients for animal's feed.

"Some of the problems with animal feed production in Indonesia include limited land for quality feed, constant fluctuations in production and quality, and the low plant ingredients quality due to the high crude fiber content," said a professor from Brawijaya University, Prof. Hendrawan Soetanto, during the "Exploring Potential Sources of Local Materials for Animal Feed according to Indonesian National Standards (SNI)" webinar hosted by PISAgro on October 14, 2021.

In addition, the relatively low ability of livestock production is related to the quality and quantity of feed available throughout the year. The availability of fluctuating feed that does not meet the nutritional needs of livestock to express its genetic potential optimally causes livestock productivity to be relatively low.

Apart from these constraints, Indonesia still has great opportunities in developing ruminants because of the potential of local



feed resources that have not been utilized optimally. The development of a local resource-based feed system is a pillar that supports the sustainable, efficient and competitive development of livestock production in Indonesia. The by-products, by-products and waste of various types of plants are potential sources of alternative feed raw materials.

Therefore, the Indonesian National Standard (SNI) is needed as a reference in making feed registration certificates as well as to control feed quality and the ingredients of circulated feed products in the market.

"Local feed ingredients have the potential as animal feed ingredients to support the development of ruminants, processing can improve nutritional quality and can make it easier to mix rations. With the formulation technique of various materials available and supplemented, rations will be obtained in accordance with SNI/PTM." explained the Main Researcher Expert of the Animal Research Institute (BPT) of the Agricultural Research and Development Agency, Dr. Dwi Sulistiyani.

To overcome this obstacle, the Ministry of Agriculture has established a set of national feed policies consisting of feed security to ensure the availability of poultry feed as well as to encourage ruminant feed industry towards feed independence. Their work programs include

optimizing the use of local feed ingredients and developing factories or feed processing units.

Data from the Agriculture Ministry stated that until 2021 there were 10 feed banks spread across Lampung, Indramayu, Probolinggo, Majalengka, Situbondo, Mojokerto and Bima. Furthermore, the researchers have also conducted various studies to develop and analyze the nutritional content of several local ingredients for animal feed through the testing process to obtain SNI.

You can download full material about this webinar via: [**bit.ly/pakansni**](https://bit.ly/pakansni).

WG Story

Jelang COP 26, Save The Children Rilis Dampak Krisis Iklim Di Indonesia



Laporan Save the Children secara global yang dirilis September 2021 menjelaskan bahwa krisis iklim di Indonesia membawa dampak nyata dan dirasakan oleh anak-anak saat ini.

Anak-anak yang lahir selama setahun terakhir telah dan akan merasakan suhu 7,7 kali lebih panas dibanding yang dialami oleh kakek-nenek mereka. Tak hanya itu, anak-anak juga akan menghadapi 3,3 kali lebih banyak ancaman banjir dari luapan sungai serta 1,9 kali lebih banyak mengalami kekeringan.

“Dampak krisis iklim ini juga tentunya dirasakan lebih buruk pada anak-anak yang hidup dalam lingkaran kemiskinan, hal ini disebabkan karena mereka sudah lebih dulu terpapar risiko yang jauh lebih besar tentang keterbatasan air, kelaparan, dan bahkan terancam menghadapi kematian karena kekurangan gizi.” Tegas Selina Patta Sumbung / CEO Save the Children Indonesia

Selain itu, dampak dari krisis iklim ini membuat jutaan anak dan keluarga masuk dalam kemiskinan jangka panjang. Di Indonesia, anak-anak akan merasakan 3,2 kali lebih banyak gagal panen dan juga masih lemahnya akses terhadap skema perlindungan sosial. Hal ini tergambaran secara jelas pada laporan terbaru Save the Children secara global “Born Into the Climate Crisis / Lahir di masa Krisis Iklim” menyerukan perlunya tindakan dan aksi yang harus dilakukan segera untuk melindungi hak-hak anak.

Secara global, anak-anak yang lahir pada 2020 akan menghadapi 7% lebih banyak kebakaran hutan, 26% lebih banyak gagal panen, 31% lebih banyak kekeringan,

30% lebih banyak banjir sungai, dan 65% lebih banyak gelombang panas—if pemanasan global dihentikan pada 1,5°C.

Save the Children menekankan masih ada waktu untuk mengubah masa depan yang suram ini. Jika kenaikan dijaga hingga maksimum 1,5 derajat, beban antargenerasi pada bayi yang baru lahir berkurang 45% untuk gelombang panas; 39% untuk kekeringan; 38% untuk banjir sungai; 28% untuk gagal panen, dan 10% untuk kebakaran hutan.

Selina juga menambahkan, “anak-anak di Indonesia akan menjadi salah satu yang terkena dampak terburuk dari krisis iklim ini. Tanpa tindakan yang segera, kita akan menyerahkan masa depan yang suram dan mematikan untuk anak-anak kita”.

Selain itu, Selina juga menjelaskan, krisis iklim pada intinya juga adalah krisis pada hak anak. Kita perlu melakukan hal sederhana dimulai dari diri sendiri dan keluarga, misalnya dengan menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil, memulai gaya hidup ramah lingkungan, dan berpartisipasi aktif dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemerintah juga harus mengembangkan tata kelola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berpihak kepada anak.

(Laporan ini diambil dari siaran pers Save The Children dengan judul **Jelang COP 26, Save The Children Rilis Dampak Krisis Iklim Di Indonesia** yang diterbitkan pada 30 Oktober 2021. Tulisan selengkapnya dapat anda lihat pada tautan berikut [ini](#).)

WG Story

Save The Children Releases Reports on Climate Crisis Impact in Indonesia Ahead of COP 26

A report from Save The Children which was released globally in September 2021 explains that the climate crisis in Indonesia carries a real impact that could be felt by children.

Children born over the past year have been and will experience temperatures 7.7 times hotter than what their grandparents had experienced before. Not only that, the children will also face 3.3 times more flood threats from overflowing rivers and 1.9 times more drought.

"The impact of this climate crisis will definitely be worse for children who live in a cycle of poverty, this was due to their previous exposure to a greater risk of limited water, hunger, and even facing deadly risks due to malnutrition." Selina Patta Sumbung, CEO of Save the Children Indonesia, said.

In addition, the impact of the climate crisis has put millions of children and families in long-term poverty. In Indonesia, children will experience 3.2 times more crop failures in addition to the weak access to social protection schemes. These issues have been clearly illustrated in Save the Children's latest global report, "Born Into the Climate Crisis", which calls for urgent action to protect children's rights.

Children across the globe who were born in 2020 will face 7% more forest fires, 26% more crop failures, 31% more droughts, 30% more river flooding and 65% more heat waves—assuming global warming stopped at 1.5°C.

Save the Children stressed there is still time to

change this bleak future. If the rise is kept to a maximum of 1.5 degrees, the intergenerational load for the newborn will be reduced by 45% for a heat wave; 39% for drought; 38% for river flooding; 28% for crop failure, and 10% for forest fires.

Selina also added, "Children in Indonesia will be among the worst affected by this climate crisis. Without immediate action, we will be leaving a bleak and deadly future for our children."

Apart from that, Selina also explained that the climate crisis is essentially a crisis on children's rights. We need to do simple things starting with ourselves and our families, for example by eliminating dependence on fossil fuels, starting an environmentally friendly lifestyle, and actively participating in climate change mitigation and adaptation actions. The government must also develop an inclusive climate change mitigation and adaptation governance by taking into account the needs of vulnerable groups such as children through pro-child policies, programs and budgeting.

(This report is taken from a Save The Children press release with the title *Ahead of COP 26, Save The Children Releases the Impact of the Climate Crisis in Indonesia*, which was published on October 30, 2021. You can see the full article at the following [link](#).)

PISAgro Update

Acara Peluncuran Toolkit Pelaporan Keberlanjutan GRI dan PISAgro



Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Bappenas, dan OJK pun menyatakan bahwa laporan keberlanjutan dan panduannya sejalan dengan prioritas kegiatan pemerintah, utamanya dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Anda dapat mengunduh pedoman ini melalui bit.ly/PISAgroToolkit

Sudah serangkaian diskusi tentang Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, PISAgro dan Global Reporting Initiative (GRI) meluncurkan Alat Pelaporan Keberlanjutan yang tersedia sebagai salinan digital di situs web masing-masing, globalreporting.org dan pisagro.org.

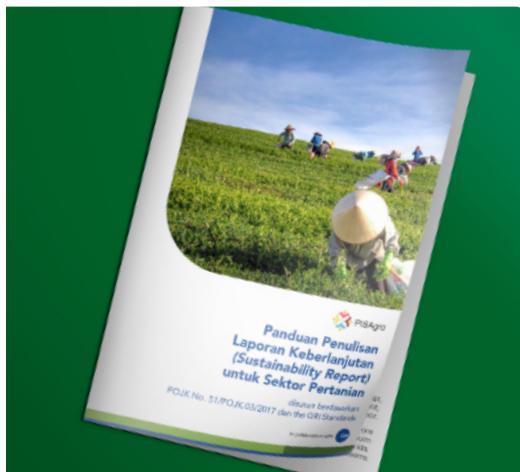
Perlu pembaca ketahui bahwa standar pelaporan toolkit telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/03/2017 untuk memastikan bahwa pedoman kami dapat mempermudah perusahaan Anda dalam membuat laporan keberlanjutan.

Toolkit ini secara resmi diperkenalkan kepada publik selama acara peluncuran pada 30 November 2021 di mana perwakilan dari pemerintah, pakar akademik, dan sektor swasta berbagi harapan mereka untuk penggunaan toolkit tersebut.

Laporan keberlanjutan ini sangat bermanfaat bagi perusahaan, tidak hanya untuk menarik investor, namun sekaligus untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang telah mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam bisnisnya.

PISAgro Update

GRI and PISAgro Sustainability Reporting Toolkit Launching Event



Following a series of discussion on Sustainability Reporting Guidelines, PISAgro and the Global Reporting Initiative (GRI) are launching a Sustainability Reporting Toolkit which is available as a digital copy in our respective websites, globalreporting.org and pisagro.org.

The toolkit was formally introduced to the public during a launching event on Nov. 30, 2021 where representatives from the government, academic experts, and private sector are sharing their expectations for the toolkit.

We would also like to inform the readers that the toolkit reporting standard has been tailored to follow the OJK Regulation No. 15/POJK.03/2017 to ensure that our guideline will be able to assist your companies on creating a sustainability report.

This sustainability reporting guideline is expected to be able to help companies attract investors and integrate their companies' business operation with proper environmental and social practices through a transparent sustainable report.

Furthermore, the Coordinating Economic Ministry, the National Development Planning Agency, and the Financial Services Authority are endorsing the usage of this guideline as it was aligned with the government's activities' priorities, specifically on Sustainable Development Goals' (SDGs) efforts.

You can download this guideline on bit.ly/PISAgroToolkit



McKinsey&Company



Knowledge grows